

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan demokrasi yang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan berbagai macam ekspresi yang timbul dalam perhelatan pemilu di tahun 2014 (pemilu legislatif dan pemilu presiden). Salah satu yang menjadi sorotan dalam momentum politik 2014 lalu adalah kehadiran partai politik (parpol) sebagai salah satu pilar dalam pelaksanaan demokrasi. Parpol yang digadang-gadang sebagai pilar demokrasi tersebut memunculkan eksistensi dan strategi dalam rangka merebut kekuasaan.

Menurut Neuman (dalam Darmawan 2008, hlm. 63) menyatakan bahwa:

Partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan di dalam pemerintahan serta merebut dukungan rakyat, yang didasari oleh persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas, teridentifikasi bahwa partai politik merupakan organisasi yang melakukan kegiatan politik, dalam rangka merebut, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan nasional.

Dalam literatur-literatur ilmu politik dijelaskan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi, seperti yang dijelaskan oleh Budiardjo (2008, hlm. 405-409) yang membagi fungsi partai politik menjadi empat fungsi, yaitu: “Sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana pengatur konflik dan sebagai sarana rekrutmen politik”.

Fungsi-fungsi partai politik tersebut merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan satu sama lain, tak terkecuali fungsi rekrutmen politik yang menjadi gerbang bagi para aktivis politik untuk tergabung dalam sebuah gerakan partai politik tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Budiardjo (2008, hlm. 408) bahwa

“Fungsi rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas”.

Berdasarkan penjelasan itulah fungsi rekrutmen politik menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan partai politik itu sendiri. Karena rekrutmen politik bertujuan untuk mendapatkan dan menyaring anggota yang akan masuk ke dalam partai politik tersebut. Kemudian para anggota itu akan mengikuti kaderisasi berupa penanaman wawasan serta pelatihan untuk dipersiapkan sebagai kader yang akan menduduki jabatan-jabatan politik, baik di internal partai maupun di pemerintahan.

Setiap partai politik tentu ingin merekrut kader-kader yang berkualitas. Karena kader-kader tersebutlah yang nantinya menjadi ujung tombak dalam setiap kebijakan yang diambil baik oleh internal partai ataupun setelah menduduki jabatan tertentu dalam suprastruktur politik.

Akan tetapi fungsi rekrutmen politik tersebut harus di tunjang dengan proses kaderisasi di internal partai. Karena proses kaderisasi merupakan suatu proses penggemblengan terhadap anggota agar mampu menjalankan roda organisasi dalam keberlangsungan kehidupan partai politik. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa proses kaderisasi merupakan tahap mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan bertindak lebih dan unggul jika dibandingkan dengan orang awam pada umumnya.

Namun realitanya dewasa ini partai politik justru dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan rekrutmen dan kaderisasi itu sendiri. Salah satu masalah yang sering muncul adalah tentang lemahnya pola rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena yang sering menjadi masalah bagi beberapa partai politik, seperti anggota partai yang sering berpindah-pindah partai atau politisi kutu loncat. Banyak elit parpol yang tercatat pernah berpindah partai diantaranya, Dede Yusuf yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) pindah ke Partai Demokrat, kemudian ada juga nama politisi kawakan Ruhut Sitompul yang malang melintang di Partai Golkar kemudian hijrah ke Partai Demokrat, bahkan yang cukup

mengagetkan adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama yang tercatat sudah tiga kali berpindah partai yakni dari Partai Indonesia Baru kemudian pindah ke Partai Golkar dan yang terakhir pindah lagi ke Partai Gerindra walaupun di akhir Basuki Tjahaya Purnama keluar dari keanggotaan Partai Gerindra.

Selain persoalan di atas masih banyak pula kader parpol yang terjerat kasus- kasus pelanggaran hukum seperti tindak pidana korupsi, hal ini membuktikan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem kaderisasi yang dilakukan. Berdasarkan pemberitaan laman Kompas (25/9/2014) data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2014 mencatat ada 48 calon anggota legislatif terpilih periode 2014-2019 yang terjerat kasus korupsi. Dari 48 anggota legislatif tersebut sebanyak 32 orang berstatus sebagai tersangka korupsi, 15 orang lainnya berstatus terdakwa dan 1 orang berstatus sebagai terpidana. Bahkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat sekitar 3.600 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan data tersebut sangat jelas terlihat bahwa ada kelemahan yang terjadi pada sistem rekrutmen dan kaderisasi di partai politik. Realita tersebut merupakan masalah yang sangat penting bagi bangsa ini, karena partai politiklah yang seharusnya menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas dan visi yang jelas.

Pada kenyataannya sering sekali partai politik melakukan perekrutan hanya dalam waktu-waktu yang mendekati pelaksanaan pemilu saja. Hal tersebut menyebabkan munculnya kader-kader instan yang tidak memiliki kecakapan dan kompetensi pada saat menduduki jabatan politik. Seharusnya partai politik mempersiapkan kader-kadernya sejak jauh-jauh hari agar mereka memiliki wawasan yang prima, kecakapan dan kompetensi yang baik dan bertanggung jawab sesuai tugas yang diembannya.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu gagasan rekrutmen dan kaderisasi yang jelas yang dimiliki oleh setiap partai politik. Karena apabila sebuah partai politik berhasil dalam membentuk kader-kader yang berkualitas, maka partai politik tersebut juga dapat menghasilkan pemimpin nasional yang berkualitas. Apabila

proses kaderisasi ini gagal, maka estafeta kepemimpinan dari generasi tua ke generasi muda akan terhambat. Hambatan dalam proses kaderisasi ini akan menciptakan sebuah kekecewaan. Kekecewaan ini salah satunya diwujudkan dengan membentuk partai politik baru dengan berbagai macam visi dan misi yang selalu mengumandangkan pembaharuan.

Salah satu parpol baru yang turut serta pada pemilu tahun 2014 adalah Partai NasDem. Meskipun di dalam peta politik nasional Partai NasDem merupakan partai baru, namun pada perkembangannya ada hal-hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana model rekrutmen yang dilakukan oleh Partai NasDem. Karena jika dilihat dari perjalanannya, dapat dikatakan NasDem sebagai partai baru memiliki prestasi yang mumpuni. Diantaranya, sebagai partai baru dalam waktu yang singkat NasDem mampu memiliki kepengurusan di semua tingkatan baik nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Hal inilah yang menjadikan NasDem sebagai satu-satunya partai baru yang menjadi peserta Pemilu 2014.

Kemudian sebagai partai yang pertama kali mengikuti pemilu, berdasarkan data KPU (411/KPTS/KPU?2014) NasDem meraih perolehan suara sah nasional pada pemilu legislatif 2014 yakni sebesar 8.402.812 atau 6,72%. Bahkan NasDem mengalahkan perolehan suara partai-partai lama peserta pemilu sebelumnya yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai HANURA, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Kiprah NasDem pun berlanjut pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinetnya, NasDem menyumbangkan kader-kader terbaiknya yang dipercaya untuk duduk di jajaran kabinet kerja. Nama-nama tersebut diantaranya Tedjo Edi Purdijanto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (MENKOPOLHUKAM), Ferry Mursyidan Baldan sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan yang terakhir adalah H.M. Prasetyo yang diangkat menjadi Jaksa Agung.

Walaupun secara prestasi dapat dikategorikan sangat baik, sebagai partai baru NasDem harus mencari model rekrutmen dan kaderisasi yang tepat untuk

dapat mencetak kader-kader berkualitas yang akan menjadi pemimpin nasional. Untuk itulah penulis mencoba mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian yang berjudul “Model Rekrutmen Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (Studi Kasus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Bandung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian tersebut dapat dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran maka harus terdapat rumusan permasalahan yang jelas. Berdasarkan judul diatas, maka perumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Bandung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam melakukan rekrutmen anggota Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Bandung?
3. Apakah permasalahan yang ditemui dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Bandung?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meminimalisir permasalahan dalam proses rekrutmen Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Bandung?
5. Bagaimana implikasi dari mekanisme rekrutmen yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme rekrutmen anggota yang dilakukan oleh DPD Partai NasDem Kota Bandung.

### **2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Bandung?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam melakukan rekrutmen anggota Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Bandung?
3. Untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Bandung?
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meminimalisir permasalahan dalam proses rekrutmen Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Bandung?
5. Untuk mengetahui implikasi dari mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Bandung?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari informasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara :

##### **1. Dari Segi Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang model rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPD Partai NasDem Kota Bandung terhadap perkembangan dan implementasi teori-teori rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik secara nyata.

##### **2. Dari Segi Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dan pedoman bagi partai politik secara umum dalam melaksanakan mekanisme rekrutmen politik.

##### **3. Dari Segi Kebijakan**

Penelitian ini dapat bermanfaat dari segi kebijakan, yaitu memberikan gambaran mengenai bagaimana mekanisme rekrutmen politik yang ideal yang bisa diterapkan sebagai kebijakan di institusi partai politik lainnya selain Partai NasDem.

##### **4. Dari Segi Isu**

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai model rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh DPD Partai NasDem Kota Bandung.

## **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah disini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep yang diajukan dalam penelitian ini, sehingga terjadi kesepahaman. Berikut ini adalah konsep yang menjadi bahan penelitian itu sendiri sebagai berikut:

### **1. Rekrutmen Politik**

Tujuan utama partai politik adalah untuk turut serta dalam atau terlibat dalam politik praktik pemerintahan, maka salah satu fungsi partai politik adalah dengan melakukan proses rekrutmen politik guna mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan dalam lembaga-lembaga negara. Menurut Darmawan, (2008, hlm. 69) bahwa “Partai politik berfungsi sebagai rekrutmen politik artinya bahwa partai politik mempersiapkan anggota masyarakat untuk menduduki jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan”.

### **2. Partai Politik**

Menurut Budiardjo (2008, hlm. 403-405) bahwa “Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama”.

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan nilai dan cita-cita yang menjadi landasan mereka.

### **3. Partai Politik Peserta Pemilu 2014**

Partai politik peserta pemilu 2014 adalah partai politik yang terdaftar, diverifikasi lalu dinyatakan lolos sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur melalui UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8

Tahun 2012 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 166/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 165/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014.

## **F. Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur organisasi skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima bab, antara lain :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat para ahli yang terkait dengan bidang yang dikaji, yaitu tentang partai politik, sejarah partai politik, dan sistem pemilu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang rincian mengenai lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, desain penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.

### **BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil temuan dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

### **BAB V : SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Berisi tentang simpulan dari keseluruhan proses kegiatan penelitian serta implikasi dan rekomendasi dari peneliti.